



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563, FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559
SITUS : www.kemenpppa.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR 179 TAHUN 2019**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 364 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Jabatan, kualifikasi pendidikan dan alokasi formasi sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI				JUMLAH
			Cumulau de	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum	
1	Ahli Pertama-Analis Kebijakan	S-1 Hukum Tata Negara / S-1 Administrasi Negara / S-1 Hukum Tata Pemerintahan / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Kebijakan Publik / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Sosial / S-1 Antropologi				1	1
		S-1 Hukum Pidana / S-1 Kriminologi / S-1 Psikologi Sosial / S-1 Kebijakan Publik				1	1
2	Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Administrasi Perkantoran / S-1 Ilmu Hukum Perdata / S-1 Sistem Informasi /				1	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI				JUMLAH
			Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum	
		S -1 Akuntansi / S-1 Manajemen Perkantoran / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Manajemen Informatika / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Ekonomi					
3	Ahli Pertama-Perencana	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ekonomi Pembangunan / S-1 Manajemen / S-1 Administrasi Pemerintahan / S-1 Manajemen Kebijakan Publik / S-1 Antropologi				1	1
4	Ahli Pertama-Pranata Komputer	S-1 Teknik Informatika / S-1 Elektronika Dan Komputer / S-1 Teknik Komputer / S-1 Sistem Komputer	1			1	2
					1	1	
5	Pelaksana/Terampil-Arsiparis	D-III Kearsipan / D-III Manajemen Informatika				1	1
6	Pelaksana/Terampil-Pranata Keuangan APBN	D-III Akuntansi / D-III Administrasi Keuangan / D-III Manajemen Keuangan				1	1
					1	1	
7	Analisis Kinerja	S-1 Manajemen / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Ilmu Pemerintahan				1	1
8	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 Manajemen / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Hukum Tata Negara / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu				1	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI				JUMLAH
			Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum	
		Pemerintahan / S-1 Manajemen Kebijakan Publik / S-1 Antropologi / S-1 Hukum Tata Pemerintahan / S-1 Ilmu Sosial					
9	Analisis Perencanaan Anggaran	S-1 Ekonomi / S-1 Ekonomi Manajemen / S-1 Ekonomi Pembangunan / S-1 Akuntansi / S-1 Hukum Tata Negara / S-1 Hukum Tata Pemerintahan / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Kebijakan Publik / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Ilmu Sosial / S-1 Antropologi				1	1
10	Analisis Perlindungan Perempuan	S-1 Kebijakan Publik / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Hukum Pidana / S-1 Kriminologi / S-1 Hukum Tata Negara / S-1 Hukum Tata Pemerintahan / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Manajemen Kebijakan Publik / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1				1*)	1
					1	1	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI				JUMLAH
			Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum	
		Antropologi / S-1 Ilmu Sosial					
11	Konselor	S-1 Psikologi				1	1
12	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Kebijakan Publik / S-1 Antropologi				1	1
13	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	S-1 Ilmu Hukum				1	1
14	Ahli Pertama-Psikolog Klinis	S-1 Psikologi + Profesi Psikolog Klinis		1		1	2
15	Ahli Pertama-Penerjemah	S-1 Sastra Inggris				1	1
16	Ahli Pertama-Pranata Hubungan Masyarakat	S-1 Ilmu Komunikasi			1	1	2
17	Ahli Pertama-Statistisi	S-2 Statistika	1			1	2
JUMLAH			2	1	1	21	25

Keterangan:

- a. *) Formasi ini dapat juga dilamar oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kriteria pelamar yang tercantum dalam pengumuman ini pada point I.2.b, dan wajib mengikuti segala ketentuan yang berlaku pada formasi umum, serta mengunggah dokumen/surat keterangan resmi yang hanya berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya pada <https://sscasn.bkn.go.id>
- b. Rencana penempatan secara detail dapat diakses di <https://kemenpppa.go.id>

I. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. Formasi Khusus terdiri dari:
 - a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian/Cumlaude:
 - 1) Pelamar merupakan lulusan terbaik (Cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "Cumlaude/dengan pujian" pada ijasah atau transkrip nilai.

- 2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar apabila telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas
- b. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan:
 - Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik
 - Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi
 - Melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2
 - Mampu melakukan aktifitas fisik dan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain
- c. Putra/putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

II. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
5. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan lowongan formasi jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai jabatan yang dilamar
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
11. Pelamar merupakan lulusan:
 - a. Jenis Formasi Umum
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 3.25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Perguruan Tinggi Swasta;
 - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah dan transkrip nilai telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol)
 - b. Jenis Formasi *Cumlaude*
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "*Cumlaude*/dengan pujian" pada ijazah atau transkrip nilai

- 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *Cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi
- c. Jenis Formasi Disabilitas
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) baik untuk Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta
 - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah dan transkrip nilai telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima).
- d. Jenis Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) baik untuk Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta
 - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah dan transkrip nilai telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima)
12. Untuk semua jabatan dipersyaratkan memiliki TOEFL ITP/*Paper Based Toefl* minimal 400 (setara dengan *Computer Based Toefl* minimal 133/ *Internet Based Toefl* minimal 45/ TOEIC 405/IELTS 4) atau *Toefl Prediction Test* 450, yang telah diperoleh sejak bulan Agustus 2018 dan setelahnya, kecuali untuk pelamar dengan kriteria Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dan Penyandang Disabilitas.
13. Khusus untuk pelamar formasi jabatan Ahli Pertama Penerjemah memiliki TOEFL ITP minimal 550 atau IELTS minimal 6,0 yang diperoleh sejak bulan Agustus 2018 dan setelahnya
14. Bagi pelamar penyandang disabilitas diwajibkan untuk hadir pada saat verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang disandang oleh pelamar, sebelum pelaksanaan SKD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
15. Untuk pelamar formasi jabatan Ahli Pertama Psikolog Klinis harus menyertakan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR
16. Surat Keterangan Kelulusan TIDAK BERLAKU

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *on-line* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

B. Dokumen persyaratan pelamar

1. Pelamar Jenis Formasi Umum

- a. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP;
- b. Surat lamaran ditujukan ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
- c. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi

- bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Khusus pelamar formasi jabatan Ahli Pertama Psikolog Klinis harus menyertakan asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR; (dalam satu file)
- d. Transkrip nilai asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat penyetaraan nilai (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri; (dalam satu file)
 - e. Dokumen pendukung (dalam satu file):
 - 1) Surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
 - 2) Sertifikat TOEFL ITP/IBT/TOEIC/IELTS, atau *Toefl Prediction Test* asli
 - f. Pas Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah
 - g. Unggah dokumen persyaratan pada point a, b, c, d, e dan f secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Pelamar Jenis Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian/*Cumlaude*:
- a. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP;
 - b. Surat lamaran ditujukan ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
 - c. Ijasah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat keputusan penyetaraan ijasah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri; (dalam satu file)
 - d. Transkrip nilai asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat penyetaraan nilai (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri; (dalam satu file)
 - e. Dokumen pendukung (dalam satu file):
 - 1) Surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
 - 2) Sertifikat TOEFL ITP/IBT/TOEIC/IELTS, atau *Toefl Prediction Test* asli
 - f. Pas Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah
 - g. Unggah dokumen persyaratan pada point a, b, c, d, e dan f secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Pelamar Jenis Formasi Khusus Penyandang Disabilitas
- a. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP;
 - b. Surat lamaran ditujukan ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
 - c. Ijasah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat keputusan penyetaraan ijasah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Khusus pelamar formasi jabatan Ahli Pertama Psikolog Klinis harus menyertakan asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR; (dalam satu file)

- d. Transkrip nilai asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat penyetaraan nilai (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri; (dalam satu file)
 - e. Dokumen pendukung (dalam satu file):
 - 1) Surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
 - 2) Asli surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat disabilitas
 - f. Pas Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah
 - g. Unggah dokumen persyaratan pada point a, b, c, d, e dan f secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>
4. Pelamar Jenis Formasi Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
- a. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP;
 - b. Surat lamaran ditujukan ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
 - c. Ijasah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.
 - d. Transkrip nilai asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan asli surat penyetaraan nilai (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - e. Dokumen pendukung (dalam satu file):
 - 1) Surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://kemenpppa.go.id>);
 - 2) Asli Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan Asli surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/ibu) asli Papua/Papua Barat.
 - f. Pas Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah
 - g. Unggah dokumen persyaratan pada point a, b, c, d, e dan f secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>
5. Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dilakukan pada tanggal 11 s.d. 25 November 2019 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>
6. Dokumen persyaratan yang di unggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang di unggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 26 s.d. 31 Desember 2019.
8. Pelamar formasi khusus penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum yang dinyatakan lulus dokumen unggah, akan dihubungi oleh Panitia untuk hadir di **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bagian Pengembangan SDM), Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat** dalam rangka mengikuti verifikasi jenis dan derajat disabilitasnya.

IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi terdiri atas 3 tahap dengan sistem gugur yang meliputi:




1. Seleksi Administrasi dokumen persyaratan yang diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>. Khusus Formasi Penyandang Disabilitas, ditambah dengan verifikasi kesesuaian jenis dan derajat kedisabilitasnya;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 40%;
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% melalui :
 - a) Tes SKB dengan CAT untuk Jabatan Ahli Pertama Analis Kebijakan, Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Ahli Pertama Perencana, Ahli Pertama Pranata Komputer, Pelaksana/Terampil Arsiparis, Pelaksana/Terampil Pranata Keuangan APBN, Ahli Pertama Psikolog Klinis, Ahli Pertama Penerjemah, Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat dan Ahli Pertama Statistisi dengan bobot 50%.
 - b) Tes Tertulis Substansi untuk Jabatan Pelaksana (selain Jabatan Fungsional pada point a) dengan bobot 50%
 - c) Tes Psikotes untuk semua jabatan (kecuali Jabatan Ahli Pertama Pranata Komputer) dengan metode *Assessment*, dan *Forum Group Discussion (FGD)* bobot 30%;
 - d) Wawancara untuk semua jabatan (kecuali Jabatan Ahli Pertama Pranata Komputer) dengan bobot 20%.
 - e) Khusus untuk Formasi Jabatan Ahli Pertama Pranata Komputer selain pada huruf a:
 1. Tes Psikotest dengan bobot dengan metode *Assessment*, dan *Forum Group Discussion (FGD)* dengan bobot 20%
 2. Wawancara dengan bobot 15%
 3. Praktek kerja komputer dengan bobot 15%

V. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah, dan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui situs internet resmi www.kemennppa.go.id. Bagi Pelamar yang lulus wajib mencetak kartu peserta ujian melalui <https://sscasn.bkn.go.id>. Khusus untuk formasi penyandang disabilitas, selain berdasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah, juga berdasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian jenis dan derajat kedisabilitasnya;
2. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi ujian SKD dengan CAT, dengan tempat dan waktu pelaksanaan ujian akan ditentukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus SKD dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan dalam satu unit kerja penempatan. Peserta yang hasil Tes Psikotes TIDAK MEMENUHI SYARAT secara otomatis dinyatakan gugur SKB;
5. Dalam hal formasi umum tidak terpenuhi dapat diisi dari formasi khusus dan apabila kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi dapat diisi pendaftar dari formasi umum sepanjang dalam jabatan yang sama dalam satu unit kerja penempatan, memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas
6. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB dengan bobot 40% : 60% sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

VI. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Pelamar tidak dipungut biaya;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP asli atau surat keterangan perekaman kependudukan yang asli dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan;
8. Pelamar dari PI/TL yang ingin mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 wajib mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018, dan dilakukan proses pendaftaran dan pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan pada jabatan dan jenis formasi yang dipilih;
9. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum wajib mengikuti segala ketentuan yang berlaku pada formasi umum, dan wajib mengunggah dokumen/surat keterangan resmi yang hanya berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya pada <https://sscasn.bkn.go.id> ;
10. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi CPNS Kemen PPPA, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi CPNS Kemen PPPA diberikan waktu maksimal 7 (hari) untuk menjawab sanggahan tersebut;
11. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah diangkat sebagai PNS;
12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
13. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2018 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2019;
14. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
15. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
16. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://kemenpppa.go.id> ;
17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 dapat menghubungi Call Center yang dapat dihubungi pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB: telpon (021)

- 3805563/3842638 (ext 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023);  kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;  @kpp_pa;  kemenpppa.
18. Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS di Nomor 081382238002 (hanya melalui WhatApps) dan *helpdesk* pada SSCASN.

Jakarta, 8 November 2019
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Selaku
Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019




Pribudharta Nur Sitepu

**JADWAL TENTATIF
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	8 November 2019
2	Pendaftaran Online (https://sscasn.bkn.go.id)	11 s.d. 25 November 2019
3	Verifikasi kesesuaian jenis dan derajat disabilitas	9 s.d. 10 Desember 2019
4	Pengumuman seleksi administrasi berkas unggah	12 Desember 2019
5	Masa sanggah	13 s.d. 15 Desember 2019
6	Jawaban sanggah	13 s.d. 19 Desember 2019
7	Cetak nomor ujian secara online	26 s.d. 31 Desember 2019
8	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Januari 2020
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Februari 2020
10	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang	Februari 2020
11	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang	Februari 2020
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (CAT)	Maret 2020
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (Wawancara dan lain-lain)	Maret 2020
14	Integrasi nilai SKD dan SKB	April 2020
15	Pengumuman kelulusan akhir secara online	April 2020
16	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	April 2020

Catatan : Apabila terjadi perubahan jadwal dapat diakses di <https://kemenpppa.go.id>

CONTOH SURAT LAMARAN

....., November 2019

Yth. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jln. Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta Pusat **Kode Pos 10110**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Formasi : Umum/Khusus (Cumlaude/Disabilitas/Putra/putri Papua dan Papua Barat)*
Alamat :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya sampaikan dokumen yang diunggah:

1.
2.
3. dst. (sesuai dengan persyaratan dokumen yang diunggah pada jabatan yang dilamar)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



ditandatangani
(Nama)

Catatan:

*) Dipilih salah satu (sesuai jenis formasi yang dipilih)

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jln. Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta Pusat **Kode Pos 10110**

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ Tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
Program studi/Jurusan :
Jabatan yang dilamar :

Merupakan pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019, menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
5. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan jika mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil periode berikutnya;

7. Bersedia mengabdikan diri di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tidak akan mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dan apabila mengajukan pindah dianggap mengundurkan diri sebagai PNS.

Demikian pernyataan yang saya buat di atas adalah benar dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi berdasarkan hukum yang berlaku, jika dikemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

Tempat :

Tanggal :

Yang membuat Pernyataan
(meterai Rp. 6000)

(nama lengkap)